



Intoleransi Merambah Jantung Pendidikan

Banyak siswa dan guru, terutama di sekolah negeri, bersikap intoleran.

Masalah intoleransi menyusup di sekolah-sekolah negeri. Kegiatan Rohani Islam (Rohis) dibiarkan berjalan sendiri, sementara guru agama sibuk mengejar target jam mengajar.

Tata tertib Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Yogyakarta mengatur ketat busana murid perempuan. Siswi beragama Islam wajib mengenakan jilbab. "Jilbab itu bukan pilihan, tapi kewajiban," kata Suharno. Ketika ditemui *Tempo*, akhir Mei lalu, Kepala SMPN 5 itu berulang kali menegaskan bahwa aturan yang diterapkannya sudah sesuai dengan Al-Quran.

Murid perempuan yang beragama lain tak diwajibkan memakai jilbab. Mereka hanya diharuskan memakai rok panjang. Model baju itu, kata Suharno, meniru busana yang dikenakan Bunda Maria. "Kalau rohnya pen-

dek, bisa jadi bahan pelecehan," katanya.

Berupaya menghindari kekerasan seksual, sekolah favorit di Yogyakarta tersebut malah menjadi sorotan publik awal tahun lalu. Lewat status di Facebook, salah satu wali murid mengeluhkan praktik *bullying* terhadap anaknya yang menjadi satu-satunya murid beragama Kristen di kelas. Ia sering diintimidasi murid lain dengan sebutan "kafir".

Lewat penelitian yang dipublikasikan pada 2011, Ma'arif Institute pernah mengingatkan soal meningkatnya intoleransi di sekolah. Mereka mempublikasikan riset serupa pada Januari lalu. Mereka menemukan ada SMA negeri di Aceh yang hanya menerima siswa beragama Islam. Ada juga SMA di Sukabumi yang hanya menggelar tadarus, salat duha bersama, dan ceramah untuk menggantikan

upacara bendera.

Masalah intoleransi di sekolah menjadi bagian dalam laporan khusus *Majalah Tempo* pekan ini tentang konservatisme agama. Laporan ini berusaha memotret wajah Islam Indonesia yang bergerak menuju kesalahan massal. Pengajian tak lagi di surau, melainkan bergeser ke perkantoran dan mal. Industri hijab, kosmetik, hingga wisata halal menyebar ke penjuru negeri.

Namun semangat keagamaan itu dicerai beragam kasus intoleransi yang kerap memakan korban. Sebut saja penyerangan jemaah Ahmadiyah dan Syiah hingga penolakan pendirian rumah ibadah agama lain. Sekolah tak luput dari munculnya resistensi terhadap kelompok yang berbeda agama.

Riset yang digelar Wahid Foundation dan Kementerian Agama yang dirilis pada Februari lalu

juga menyimpulkan kekawatiran senada. Sekolah menjadi tempat potensial tumbuhnya radikalisme.

Sebanyak 41 persen dari 1.626 murid pengurus kelompok Rohani Islam (Rohis) yang menjadi responden dalam acara perkemahan rohani, Mei tahun lalu, setuju jika Indonesia diubah menjadi negara Islam dan menggunakan konsep *khilafah*. "Ada 60 persen responden yang mengatakan siap berjihad di masa mendatang," kata Direktur Wahid Foundation, Zanuba Arifah Chafsoh.

Meski aktif di kegiatan kerohanian di sekolah, para murid itu justru dianggap yang paling rentan menjadi intoleran. Peneliti dari Ma'arif Institute, Pipit Aidul Fitriyana, menilai para aktivis Rohis umumnya tak memiliki basis keagamaan kuat seperti mereka yang menempuh pendidikan agama di pesantren.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005